

ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN JAYAWIJAYA PROPINSI PAPUA

Penus Yikwa

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan
Universitas Sam Ratulangi, Manado
Email : penusy@yahoo.com

ABSTRAK

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 juga tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, mengandung konsekuensi yang cukup “menantang”. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendapatan Daerah (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008) adalah salah satu instansi pelaksana di bidang pengelolaan pendapatan daerah sampai berakhirnya tahun anggaran 2012 ini. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui situasi kondisi perkembangan penerimaan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, Merumuskan strategi perkembangan penerimaan Retribusi Pasar dalam meningkatkan penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Kata Kunci : Pendapatan, Retribusi Pasar, PAD

ABSTRACT

With its Statute issue Number 21 Years 2001 also about Special Autonomy for Papuan Province, containing consequence that adequately “against”. Get bearing with that thing, On duty Region Income (Number Region regulation 4 Years 2008) are one of executor institution at propertied management area region until gets finally budget year 2012 it. On duty region income (Dipenda) get direct bearing with region effort in digs up and increase region acceptance source, particularly incoming one comes from PAD “. Researcher does this research, On Duty Region Income (Dispenda) Jayawijaya regency, Office on duty Co-op, Micro effort, Little and Intermediate, Industry and commerce, market and elements relate, at Jayawijaya Regency Papuan Province. Ekstensification constitutes a condition that emphasizes on something scoping effort wider ala instead of already there is, then intensification has emphasis meaning in intent attainment with utilize aught sources.

Keyword : Income, Retribution of Traditional Market, PAD

A. PENDAHULUAN

Sumber Pendapatan Daerah Terdiri Atas :

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
 - 1). Hasil pajak daerah;
 - 2). Hasil retribusi daerah;
 - 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4). Lain-lain PAD yang sah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut data dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Jayawijaya selama lima tahun terakhir, target dan realisasi dari retribusi pasar adalah sebagai berikut

Tabel 1 Target dan Realisasi Retribusi Pasar Kabupaten Jayawijaya

Tahun	Target	% Kenaikan	Realisasi	% Kenaikan	% Selisih Realisasi Dan Target
2008	1.417.227.000,	12,37	1.431.201.210,	11,72 (150.284.100)	0,99 (13.974.210)
2009	1.452.758.000,	2,51	1.482.394.970,	3,58 (51.193.760)	2,04 (29.636.970)
2010	1.512.045.000,	4,08	1.542.169.125,	4,03 (59.774.155)	1,99 (30.014.125)
2011	1.671.837.000'	10,57	1.703.564.815,	10,46 (161.395.690)	1,90 (31.727.815)
2012	1.710.487.000,	2,31	1.750.130.525	2,73 (46.565.710)	2,32 (39.643.525)

Sumber : *Laporan Hasil Kegiatan Bidang Pengelolaan Pasar 2008-2012*

Tabel di atas menjelaskan bahwa rata-rata setiap tahun anggaran, realisasi retribusi pasar selalu melebihi target yang ditetapkan. Tetapi kalau kita lihat, penetapan target setiap tahun angka persentasenya kecil, yang terbesar selama lima tahun tersebut ada di tahun 2008 (12,37%) dan ternyata realisasinya pun tercapai. Disisi lain bisa dilihat selisih realisasi penerimaan pendapatan dari retribusi pasar ini tergolong amat kecil karena berada pada kisaran 0% - 2,31%.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa realisasi retribusi pasar tergolong kecil karena presentase selisih target dan realisasi memperlihatkan angka yang kecil pula. Angka tersebut juga fluktuatif artinya presentase realisasi penerimaan retribusi pasar tidak menunjukkan angka yang stabil karena kalau dilihat realisasi pendapatan dari retribusi pasar selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun anggaran 2008 target penerimaan retribusi pasar sebesar Rp 1.417.227.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.431.201.210,- yang menunjukkan presentase selisih target dan realisasi sebesar 0,99%. Tahun anggaran 2009 dari target penerimaan retribusi pasar sebesar Rp 1.452.758.000,- terealisasi sebesar Rp1.482.394.970, sehingga presentase selisih antara target dan realisasi diperoleh angka 2,04%. Tahun anggaran 2010 dari target penerimaan retribusi pasar sebesar Rp 1.512.045.000,- terealisasi sebesar Rp 1.542.169.125,- sehingga presentase selisih antara target dan realisasi menunjuk angka 1,99%. Tahun anggaran 2011 dari target penerimaan retribusi pasar sebesar Rp 1.671.837.000,- terealisasi sebesar Rp 1.703.564.815,- sehingga presentase selisih antara target dan realisasi menunjukan angka 1,90%. Tahun anggaran 2012 dari target penerimaan retribusi pasar sebesar Rp 1.710.487.000,- terealisasi sebesar Rp 1.750.130.525,- sehingga presentase selisih antara target dan realisasi menunjuk angka 2,32%. Jadi nilai average (rata-rata) selama lima tahun terakhir dari kenaikan realisasi penerimaan retribusi pasar hanya sebesar 1,85%.

Pembangunan ekonomi adalah suatu upaya yang dilakukan suatu negara dengan tujuan untuk mengembangkan aktivitas ekonomi. Menurut Meir (1995:12) dalam Sawitri (2007) secara umum pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang mendorong pendapatan perkapita suatu negara meningkat dalam jangka panjang. Dari pengertian ini terdapat tiga unsur penting dari pembangunan ekonomi, yakni (1) suatu proses, berarti perubahan terjadi terus menerus, (2) usaha menaikkan pendapatan perkapita, dan (3) kenaikan pendapatan perkapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang. Dengan demikian pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar saling terkait dan mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi tersebut dapat dilihat dan dianalisis.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dimulai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan". Davey (1988:9) menambahkan bahwa "masalah keuangan daerah menyangkut upaya mendapatkan uang maupun membelanjakannya".

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan". Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Retribusi daerah menurut UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah yaitu: Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Mendefinisikan manajemen strategis adalah sebagai "upaya yang di disiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu".

Logika dasar dari manajemen adalah bahwa dalam lingkungan dunia yang berubah secara pesat dan tak menentu, suatu organisasi memerlukan kemampuan untuk mengadakan perubahan pada perencanaan maupun manajemen secara tepat. Maka kemampuan untuk senantiasa melakukan penelahan kemampuan dan kelemahan internal menjadi prasarat bagi organisasi untuk tetap strategis.(Bryson, 1995:3). Sedangkan Blakely (1989:44) berpendapat bahwa "Kebijakan perpajakan selalu menjadi komponen utama dari kebijakan pembangunan ekonomi". Dalam prakteknya di Indonesia, sektor utama yang memberikan kontribusi paling besar terhadap kemampuan keuangan daerah secara umum adalah sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Ekstensifikasi merupakan suatu kondisi yang menekankan pada upaya penjangkauan sesuatu secara lebih luas dari pada yang telah ada. Sedangkan ekstensifikasi pajak/retribusi menurut Soemitro (1988:384) adalah :

- a) Penambahan pajak/retribusi baru dengan menemukan wajib obyek pajak/retribusi baru,
- b) Menciptakan pajak-pajak/retribusi baru, atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada.

Intensifikasi memiliki makna penekanan dalam pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Ada pun langkah-langkah intensifikasi, berdasarkan Sari Kajian dan

Moneter (1996:39) ”dimaksudkan untuk mengefektifkan pemungutan pajak terhadap subyek dan obyek pajak/retribusi yang sudah dikenakan sebelumnya dengan memberikan kegiatan penerangan, penyuluhan dan sosialisasi pajak/retribusi lainnya”. Selanjutnya menurut Soemitro (1988:77), sistem intensifikasi pajak/retribusi maksudnya untuk meningkatkan pajak/retribusi dengan mengintensifkan segi-segi:

Tujuan tulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui situasi kondisi perkembangan penerimaan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua.
2. Merumuskan strategi perkembangan penerimaan Retribusi Pasar dalam meningkatkan penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka serta berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

Pada penelitian ini, penulis mencoba untuk membuat sebuah deskripsi mengenai strategi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua.

Tempat dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini, pada Dispemda kabupaten Jayawijaya, Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan, pasar serta unsur-unsur terkaitnya, di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. dan peneliti melakukan penelitian selama 2 (dua) bulan.

Populasi dan Sampel

population atau *universe* adalah jumlah dari keseluruhan obyek (satuan-satuan/ individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga. Satuan-satuan/ individu-individu ini disebut unit analisis. Unit analisis mungkin merupakan orang, rumah tangga, tanah pertanian, perusahaan, koperasi, pasar dan lain-lain dalam bentuk yang bisa dipakai dalam survey. *Sampel* adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah populasinya).

Untuk menentukan sampel responden dalam penelitian ini di tentukan 36 orang. terdiri dari 1 Orang Kepala Dipenda, 2 orang Kepala Bidang Dipenda , 4 Kepala Seksi dipenda, 10 orang ujung pasar Kabupaten Jayawijaya, 1 orang kepala dinas Pegolahan pasar, 1 orang kepala bidang pegelolahan pasar, 2 orang kepalah seksi kasi sarana dan parasarana pasar, wajib retribusi yang di ambil dari asosiasi pedagang pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Cabang Kabupaten Jayawijaya, 5 orang , 10 orang dari masyarakat umum, yang usaha kecil dan usaha-usaha besar pada lingkungan Kabupaten Jayawijaya.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang di gunakan Dalam penelitian kualitatif ini, untuk mengumpulkan dan mengolah data, peneliti menggunakan dengan beberapa cara seperti :

1. Metode Dokumenter,
2. Observasi,
3. Metode Wawancara

Metode Analisis

Analisa data yang di pakai dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif, dengan pendekatan kualitatif,

C. HASIL PENELITIAN

Keadaan Geografis dan Administrasi Pemerintahan

Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua yang terletak pada 60,83°-90,23° Lintang Selatan dan 1.090,49°– 1.050,78 Bujur Timur. Kabupaten Jayawijaya beribukota di Wamena yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jayawijaya dan diresmikan sebagai ibukota Kabupaten Jayawijaya.

Keadaan Demografi

Komposisi penduduk di Kabupaten Jayawijaya jika ditinjau dari jenis mata pencaharian, sebagai berikut : 32,80% bekerja pada bidang pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan, 25,85% bekerja pada industri pengolahan, 19,71% bekerja pada bidang perdagangan, 10,47% bekerja pada bidang jasa, 4,84% di bidang transport dan komunikasi, serta lain-lain sebesar 6,33%.

Sedangkan dilihat dari angka *dependency ratio* atau angka ketergantungan, yaitu perbandingan antara penduduk tidak produktif (golongan umur 0-14 tahun dan diatas 65 tahun) dengan penduduk produktif (golongan umur 15-65) sebesar 57, artinya pada tahun 2012 dalam setiap 100 orang penduduk Kabupaten Jayawijaya usia produktif terdapat 57 orang penduduk tidak produktif.

Penduduk Kabupaten Jayawijaya sampai dengan Juni 2012 berjumlah 965.745 jiwa dengan kepadatan penduduk per Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2 Kepadatan Penduduk per-km2 di Kabupaten Jayawijaya.

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Per Km
1.	Wamena Kota	60,55	39.285	649
2.	Kurima	92,99	45.857	493
3.	Asologaima	58,20	12.798	220
4.	Kurulu	73,58	12.716	173
5.	Yalengka	58,57	28.672	490
6.	Wesaput	68,44	44.347	648
7.	Wesaret	63,48	43.265	682
8.	Bolakme	75,15	72.249	961
9.	Melagalome	68,51	76.580	1.117
10.	Wolo	32,39	73.020	2.254
11.	Bugi	25,90	49.281	1.902
12.	Siopkosi	40,05	73.838	1.844
13.	Wame	18,79	47.244	2.514
14.	Pelebaga	22,93	92.535	4.036
15.	Ubikiak	20,99	36.852	1.756
16.	Musalfak	9,54	46.721	4.897
17.	Asolokobal	17,38	65.864	3.790
18.	Ogabaga	12,70	59.315	4.670
19.	Wosi	15,91	45.306	2.848
Jumlah		836,13	965.745	1.155

Sumber Data : *Kantor Dukcapil Kabupaten Jayawijaya Per 10 Juni 201*

Tabel 3. Laju Inflasi Tahun 2008 – 2012

Tahun	Laju Inflasi
2008	3,32%
2009	5,64%
2010	16,935
2011	6,55%
2012	5 ,35%

Sumber : *Bappeda Kabupaten. Jayawijaya 2008-2012*

Laju inflasi Kabupaten Jayawijaya tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2008 adalah 3,32% kemudian pada tahun 2010 naik secara signifikan menjadi 16,93% yang terutama disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran biaya konsumsi masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan dan transportasi sebagai akibat naiknya harga BBM. Namun pada tahun 2011 secara drastis turun menjadi 6,55% yang disebabkan oleh kestabilan harga-harga komoditas namun pada tahun 2012 5,35%. naik juga yang disebabkan oleh harga BBM.

Investasi atau penanaman modal merupakan determinan penting dalam pembentukan modal tetap bruto terhadap product domestic bruto (PDB) setiap tahunnya. Nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Jayawijaya pada dasarnya terdiri dari investasi Pemerintah melalui proyek-proyek yang bersifat belanja modal atau penambahan aset dan investasi yang berasal dari sektor swasta.

Kinerja investasi dari tahun ke tahun menunjukkan iklim investasi yang cukup baik. Pertumbuhan rata-rata jumlah industri besar, menengah dan kecil non PMA/PMDN, serta rumah tangga meningkat. Selengkapnya perkembangan jumlah dan nilai investasi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4. Jumlah Investasi Menurut Kelompok Industri Tahun 2008-2012

No	Tahun	Tahun			
		Besar	Menengah	Kecil	Rmh Tangga
1	2008	292.924.675	264.158.470	79.468.954	19.376.800
2	2009	296.633.595	287.284.000	84.830.825	21.082.750
3	2010	296.633.595	280.376.380	86.219.161	21.092.100
4	2011	337.725.533	131.685.080	45.151.483	16.265.650
5	2012	338.957.332	134.653.020	51.229.638	18.974.870

Sumber : *Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan 2008-2012*

Perkembangan PDRB secara agregat atas dasar harga berlaku tahun 2012 sebesar Rp 5.062.021,36 dan tahun 2011 sebesar Rp 4.568.471,02 sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2012 Rp 2.833.078,05 dan tahun 2011 sebesar Rp 2.710.378,32.

Struktur ekonomi di Kabupaten Jayawijaya hingga tahun 2012 ini masih didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar 27,91%, disusul sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 20,02%. Sektor perdagangan, restoran dan hotel memberikan kontribusi 18,99% dan jasa-jasa sebesar 15,91%. Namun sampai dengan tahun 2012, kondisi pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan paling besar dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya yaitu sebesar 8,66%. Sedangkan sektor industri pengolahan merupakan sektor dengan pertumbuhan terendah yaitu sebesar 3,96%.

**Tabel 5. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Di Kabupaten Jayawijaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012**

No	Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Pertanian	8,27	7,36	13,26	19,12	10,83
2.	Pertambangan dan penggalian	9,44	10,50	26,94	16,40	15,18
3.	Industri pengolahan	7,34	8,81	19,31	13,50	9,91
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	35,57	11,84	13,73	10,30	12,58
5.	Bangunan	7,83	9,76	14,39	14,93	13,23
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	7,62	8,50	17,56	14,72	10,20
7.	Pengangkutan dan komunikasi	10,49	7,01	23,64	6,57	10,88
8.	Bank dan Lembaga Keuangan	9,41	12,54	26,87	19,60	11,86
9.	Jasa-jasa	820	14,47	24,06	11,39	11,44
	Produk Domestik Regional Bruto	8,29	9,47	18,70	14,50	10,80

Sumber : *Bappeda Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008-2012*

Tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jayawijaya mencapai angka tertinggi selama lima tahun tersebut (2008-2012) adalah pada tahun 2010, kemudian menurun hingga tahun 2012. Namun demikian kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan maka dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 6 Distribusi Presentase PDRB Menurut Lapangan Usaha
Di Kabupaten Jayawijaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012**

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Pertanian	20,56	20,16	19,24	20,01	20,02
2.	Pertambangan dan penggalian	1,06	1,07	1,14	1,16	1,21
3.	Industri pengolahan	28,41	28,24	28,38	28,14	27,91
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	1,33	1,36	1,30	1,25	1,27
5.	Bangunan	5,83	5,85	5,63	5,65	5,78
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	19,55	19,38	19,19	19,23	19,13
7.	Pengangkutan dan komunikasi	4,55	4,45	4,63	4,31	4,32
8.	Bank dan Lembaga Keuangan	4,08	4,14	4,42	4,62	4,66
9.	Jasa-jasa	14,69	15,36	16,05	15,61	15,70
T o t a l		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : *Bappeda Jayawijaya 2008-2012*.

Tabel 4.7: Distribusi Presentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2008-2012 standar Kabupaten adalah distribusi presentase PDRB tahun 2008 Rp 100,00% dan retribusi presentase PDRB tahun 2009 Rp.100,00% kemudian retribusi persentase PDRB tahun 2010 Rp 100,00% sedangkan juga tahun 2011 Rp 100,00% .demikian PDRB pada tahun 2012 Rp 100,00% .Selanjutnya akan melihat pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 7 Indikator Makro Ekonomi Kabupaten. Jayawijaya Tahun 2008 – 2012

Indikator	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Pertumbuhan Ekonomi	3,66	4,39	3,98	4,21	4,53
Tingkat Inflasi	3,32	5,64	16,93	6,55	5,35
PDRB ~HargaBerlaku ~Harga Konstan	3.472.097.579 962.618.071	3.814.807.95 7 1.001.446.10 6	4.656.616.980 1.035.450.341	4.568.471.020 2.710.378.320	5.062.021.360 2.833.078.050
Pendapatan per Kapita	3.545.356	3.887.882	4.671.990	5.135.641	5.629.209

Sumber : *BPS Kab.Jayawijaya 2008-2012*

Tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi relatif mengalami kenaikan, hanya di tahun 2008 mengalami penurunan. Belum optimal dan stabilnya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh kelesuan kegiatan ekonomi pada sektor riil serta kondisi makro ekonomi nasional, regional maupun global yang mengalami gejolak dan cenderung tidak stabil.

Sedangkan untuk jumlah pasar tradisional yang ada di Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada tabel :

Tabel 8 Jumlah Pasar Tradisional Di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2012

No	Nama Pasar	Kls	Luas Lahan (m ²)	Jumlah			Jumlah Pedagang		Fasilitas Yang Tersedia		
				Kios	Ruko	Los	Aktif	Pasi f	MCK	Parkir	TPS
1	P.Jibama	I	18.490	258	46	59	1.674	104	2	2	-
2	P.Sinakma	I	27.340	166	18	65	1.065	121	2	4	1
3	P.Misi	I	8.645	168	-	20	1.342	156	2	2	1
4	P.Kaget	II	7.340	51	22	44	749	57	-	-	-
5	P.Potikelek	II	1.415	46	-	42	525	6	1	1	-
6	P.Pingir Lapangan	II	3.880	62	-	23	571	62	1	1	1
7	P.Hom-Hom	II	2540	69	-	8	569	62	1	1	1
8	P.Jalan Irian	III	4.610	43	-	7	398	10	1	1	1
9	P.Wesaput	III	5.895	84	-	12	366	14	1	1	1
10	P.Kimbim	III	10.000	2	-	7	14	2	1	1	-
Jumlah			90.155	949	86	287	7.273	649			

Sumber : *Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayawijaya 2011*

Aspek ekstensifikasi dalam rangka peningkatan retribusi pasar . perkembangan retribusi pasar dari tahun anggaran 2008-2012 menunjukkan hasil yang cukup baik .

Berikut ini akan menyajikan data jawaban informan terhadap aspek ekstensifikasi dalam upaya peningkatan retribusi pasar.

Gambaran peningkatan jumlah pedagang dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Jumlah Peningkatan Pedagang Pasar Tradisional 2008-2012 Di Kabupaten Jayawijaya

Tahun	Jumlah Pedagang	Peningkatan Jumlah	% Kenaikan
2008	2.765		
2009	4.793	2.028	73,35
2010	6.955	2.162	45,11
2011	7.657	702	10,09
2012	7.922	265	3,46

Sumber : *Data Diolah DINPERINDAGKOP UMKM Kabupaten Jayawijaya*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dalam setiap tahun senantiasa terjadi penambahan jumlah wajib retribusi baru sebagaimana hasil interview dengan para informan dilapangan dan data yang tercatat pada Bidang Pengelolaan Pasar.

Tabel 10 Aspek Intensifikasi dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar

No	Inti Pernyataan (Fenomena)	SJ		CJ		KJ		TJ	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Penambahan jumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan pasar dalam lima tahun terakhir	-	-	2	13	-	-	13	87
2	Tugas dan tanggung jawab yang dijalankan instansi berwenang (bidang pengelolaan pasar) senantiasa berpedoman pada peraturan perundangundangan yang ada.	11	73	-	-	-	-	4	27
3	Peraturan yang ada dijalankan secara nyata di lapangan	11	73	-	-	-	-	4	27
4	Kuantitas dan kualitas aparatur pengelola pasar dalam menunjang tugas-tugasnya	11	73	-	-	-	-	4	27
5	Kesesuaian struktur organisasi yang berlaku dengan tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan pasar.	-	-	-	-	15	100	-	-
	Kesesuaian tugas/pekerjaan dengan pengetahuan/skill yang dimiliki	-	-	-	-	15	100	-	-
7	Pembagian wewenang dalam pekerjaan	15	100	-	-	-	-	-	-
8	Kemampuan struktur organisasi yang berlaku dalam memberikan ruang gerak pada birokrat di tingkat operasional	-	-	-	-	15	100	-	-
9	Koordinasi dalam pekerjaan	-	-	-	-	15	100	-	-
10	Kondisi sarana prasarana bidang pengelola pasar dalam menunjang tugas dan tanggung jawabnya	-	-	-	-	15	100	-	-
11	Penyelewengan dalam pemungutan retribusi pasar.	-	-	8	54	1	6	6	40
12	Diskriminasi pemungutan	-	-	8	54	1	6	6	40
13	Penegasan sanksi bagi birokrat/staf pelaksana dan wajib retribusi yang melakukan penyelewengan atau pelanggaran.	-	-	10	67	1	7	4	27
14	Pelaksanaan pengawasan.	11	73	-	-	4	27	-	-

Sumber : *Data primer DINPERINDAGKOP UMKM Kabupaten Jayawijaya*

Pada item penambahan jumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan pasar dalam lima tahun terakhir, tabel di atas menunjukkan terdapat 13 orang (87%) informan menyatakan jelas tidak ada penambahan jumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan pasar dalam lima tahun terakhir, sedangkan 2 orang (13%) informan lain menyatakan kurang setuju kalau ada penambahan jenis/obyek retribusi pasar dan kemungkinan penambahan obyek retribusi pasar dalam lima tahun terakhir.

Hasil wawancara kepada para informan mengenai item kesesuaian struktur organisasi yang berlaku dengan tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan pasar menunjukkan bahwa semua (100%) informan menyatakan struktur organisasi yang berlaku kurang menjelaskan atau kurang sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan pengelola pasar cukup berat karena beban kerja pengelolaan pasar cukup besar dan angung jawab yang besar terhadap pemenuhan target pendapatan asli daerah sehingga dituntut struktur organisasi yang terpisah agar pelaksanaan tanggung jawab dapat dilaksanakan secara optimal.

Analisis Data

Setelah penyajian data dilakukan, maka data-data tersebut akan dianalisis dengan berpedoman pada Gambar 2.1 Perencanaan Strategis untuk Organisasi dari Bryson and Roring (1987:10) sebagaimana dijelaskan dalam Bab II penulisan skripsi ini.

Adanya kesadaran membayar retribusi dari masyarakat

Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa 67% informan mengenathui fantor eksternal yang mempengaruhi Penerimaan retribusi pasar. Salah satu dari faktor tersebut adalah kesadaran masyarakat (pedagang) dalam membayar retribusi.

Masih ada obyek retribusi yang belum tergali

Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa ada 87% informan menyatakan bahwa selama lima tahun terakhir tidak ada penambahan obyek retribusi pasar, namun justru ada beberapa obyek retribusi yang belum tergali sama sekali seperti pemberhentian kendaraan di emplasment pasar untuk bongkar barang, biaya cetak dan administrasi, dan biaya pelimpahan. Jadi berdasarkan realita tersebut masih ada peluang pendapatan retribusi yang bisa diupayakan secara optimal.

Kemajuan ilmu dan teknologi

Semakin majunya ilmu dan teknologi merupakan peluang bagi Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya untuk meningkatkan retribusi daerah. Salah satu bentuk realisasinya adalah dengan penggunaan sistem komputerisasi yang akan meningkatkan efisiensi organisasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Krisis kepercayaan terhadap Pemda

Berdasarkan informasi di lapangan diperoleh keterangan terjadinya krisis kepercayaan terhadap Pemerintah Daerah karena sikap dari pegawai/petugas pasar dalam melaksanakan tugas/tanggung jawabnya.

Instabilitas keamanan

Pasar ternyata menjadi tempat yang kurang aman untuk menyimpan barang-barang dagangan, padahal para pedagang yang menempati kios, toko/ruko jelas tidak mungkin untuk membawa barang-barang dagangan ke rumah bila tidak ada tujuan tertentu. Walaupun tidak seberapa banyak yang diambil, namun sering terjadi. Sebagian besar pedagang mengalami hal ini. Kondisi ini dianggap wajar karena jumlah pegawai di bidang pengelolaan pasar secara keseluruhan berjumlah 129 orang. Dari jumlah tersebut hanya 1,21% adalah tenaga keamanan pasar. Jadi jumlah pegawai untuk keamanan pasar yang sangat terbatas tersebut menyebabkan seringnya terjadinya instabilitas keamanan di pasar-pasar.

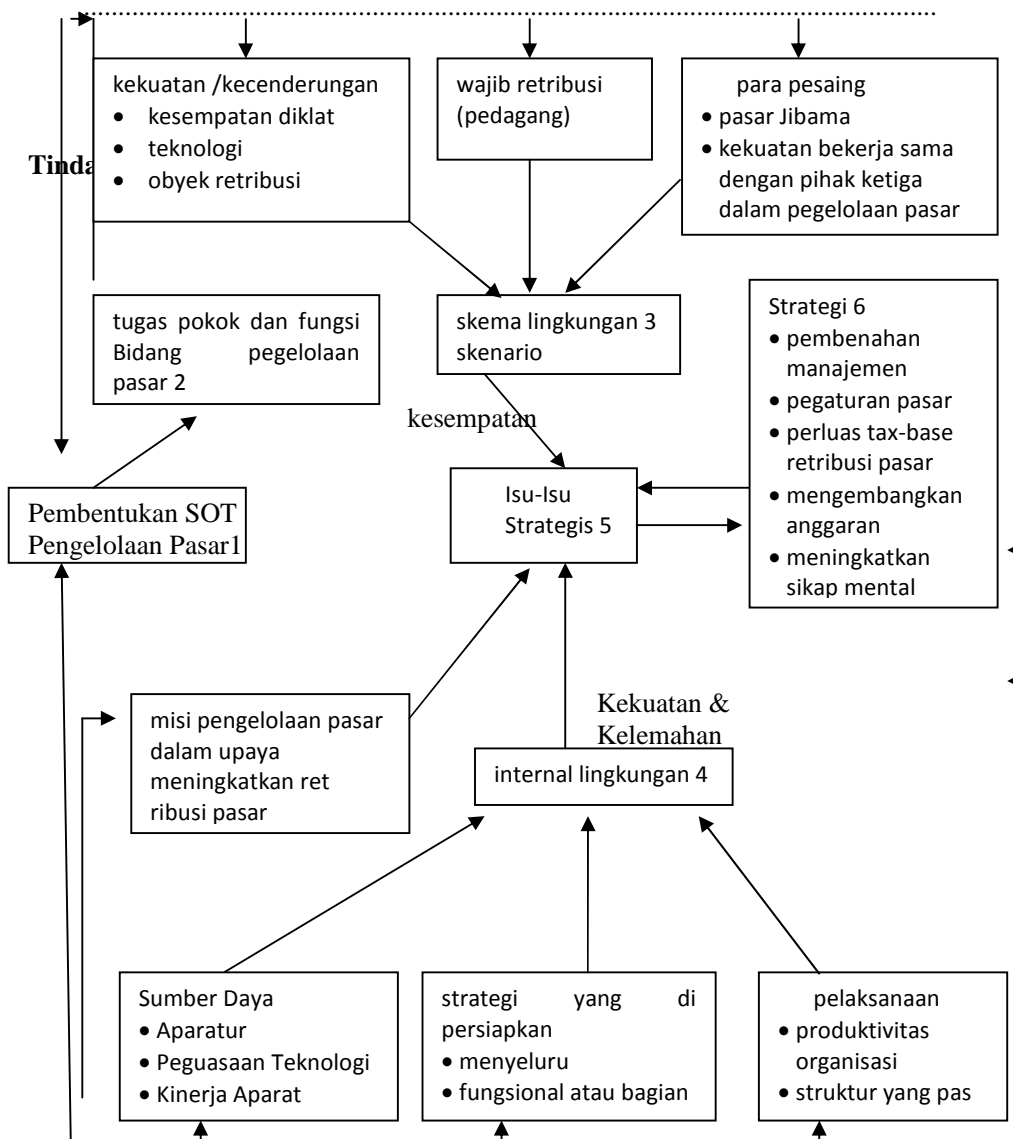
Keberatan terhadap penetapan retribusi pasar

Keberatan terhadap penetapan retribusi pasar ini sebenarnya karena kurangnya sosialisasi Bidang Pengelolaan Pasar terhadap Perda Retribusi Pasar yang berlaku baik kepada pegawai/petugas pasar maupun wajib retribusi.

Pembahasan

Pada pembahasan analisis di atas yang Berdasarkan pada proses manajemen strategis menurut Bryson dan Roring, maka dapat dirumuskan strategi-strategi dalam rangka meningkatkan Penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Jayawijaya.

Setelah dilakukan penyajian data dan analisis data hasil penelitian, maka rangkaian kegiatan hasil pembahasan penulisan Skripsi ini dapat diaplikasikan dalam Bagan Bryson dan Roring sebagai berikut:



Gambar 1 Perencanaan Strategi Dalam Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Jayawijaya

Strategi

Strategis merupakan suatu seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan hal-hal strategis dengan menggunakan kecakapan dan

Sumber daya suatu organisasi untuk mencapai suatu sasaran melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Berikut ini dalam tabel 4.10 akan disajikan data jawaban informan terhadap aspek strategis dalam upaya peningkatan Penerimaan retribusi pasar.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dan permasalahan, maka kesimpulan yang dapat di ambil adalah Pada tahun 2008-2012 rata-rata kinerja analisis penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut:

1. Ekstensifikasi adalah program dalam upaya peningkatan penerimaan retribusi pasar yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan cukup berhasil adalah masih terus meningkatnya wajib retribusi baru dengan gejala terus meningkatnya jumlah pedagang di pasar-pasar tradisional.
2. Intensifikasi juga merupakan program dalam upaya peningkatan penerimaan retribusi pasar yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan mampu dilaksanakan dengan baik yaitu peraturan yang mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kegiatan retribusi pasar telah jelas, kualitas dan kuantitas aparat bidang pengelola pasar diketahui secara jelas.

Saran

Setelah melalui tahapan penilaian terhadap strategi-strategi yang telah dirumuskan tersebut, maka penulis menyarankan 2 (dua) strategi dijalankan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, yaitu:

1. Memperluas *tax-base* retribusi pasar dengan cara melakukan penerimaan kembali wajib retribusi pasar, penerimaan secara intensif mengenai subyek dan obyek retribusi pasar yang baru, mengajukan usulan pembaharuan perda retribusi pasar yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi masyarakat yang ada serta upaya yang menyangkut obyek retribusi pasar potensial yang belum tergal.
2. Menyeimbangkan anggaran penataan lingkungan pasar dengan penerimaan retribusi pasar, melalui langkah negosiasi antara Bidang Pengelolaan Pasar dengan pemerintah daerah agar diperoleh anggaran yang seimbang bagi penataan dan pemeliharaan fasilitas serta lingkungan pasar yang memadai, juga mengupayakan adanya pembagian hasil langsung dari perolehan retribusi pasar bagi penanganan masalah-masalah yang bersifat mendesak dan peningkatan kesejahteraan pegawai/petugas teknis pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahamad Yani .(2002:55) Daerah Provinsi Kabupaten /Kota Di Beri Peluang Ugm Yongyjakarta .
 Blakely, Edward J, 1989 "Planning Local Economic Development Theory And Practic)" Sage Publication Inc Newburry Park California
 Dwiyanto, Agus, (1995-200:107-114), "Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik", Ugm, Yogyakarta
 Kaho, J. Riwu, 1988, "Analisa Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah", Bina Aksara, Jakarta
 Moneter (1996 :39) Upaya Intensifikasi Retribusi Pasar Prisma Nomor 4 April Jakarta
 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
 Undang-Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Kuhsus Bagi Provinsi Papua